

Praxis Gerakan Feminis di Indonesia: Dinamika Aksi Politik dan Produksi Pengetahuan

Praxis of Feminist Movement in Indonesia: Dynamics of Political Action and Knowledge Production

Ruth Indiah Rahayu

Kandidat Doktor Program Studi Filsafat, STF Driyarkara
Jalan Komplek Cempaka Putih Indah No. 100A, RT 1 RW 7, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10520

ruth.indiahr@driyarkara.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 15 Juli 2022, direvisi 8 Agustus 2022, diputuskan diterima 11 Agustus 2022

Abstract

Women face barricades at all levels of activity, but not all of them understand that they face problems as women. Feminism contribution throughout the history has been to formulate the "women's question" as political knowledge and action. This feminist knowledge includes the experiences of "women's question" at the personal level, family organizations, community organizations, cultural organizations, production organizations and state organizations. Political action and feminist knowledge are praxis that is also happening all over the world and also in Indonesia. Praxis in Indonesia can be traced since Kartini raised "women's question" as a personal experience to the growth of the women's movement which has experience in emancipating "women's issues". The problem is that there is often inter-issue stress and support between political action and production so that "women's question" seem to be reduced to prominent issues. This paper is self-reflective, that is, dialogically reading the collective history of the feminist movement from the personal side of the activists themselves

Keywords: "woman question", women's political action, feminist knowledge production

Abstrak

Kaum perempuan menghadapi barikade di semua level aktivitas dirinya, tetapi tidak semua perempuan mengetahui bahwa dirinya menghadapi persoalan sebagai perempuan. Sumbangan feminisme sepanjang sejarah adalah memformulasikan "persoalan perempuan" (*women's question*) sebagai pengetahuan dan aksi politik. Pengetahuan feminisme ini mencakup pengalaman "persoalan perempuan" pada tingkat personal, organisasi keluarga, organisasi masyarakat, organisasi kebudayaan, organisasi produksi, dan organisasi negara. Aksi politik dan pengetahuan feminisme adalah praxis yang juga terjadi di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Praxis di Indonesia dapat dirunut sejak Kartini mengangkat "persoalan perempuan" sebagai pengalaman pribadi hingga tumbuhnya gerakan perempuan yang memiliki pengalaman dalam mengemansipasi "persoalan perempuan." Persoalannya bahwa sering kali ada tegangan antar-isu dan kesenjangan antara aksi politik dan produksi pengetahuan sehingga "persoalan perempuan" seperti tereduksi ke dalam isu yang menonjol. Tulisan ini bersifat *self-reflective* yaitu membaca secara dialogis pengalaman sejarah kolektif gerakan feminis dari sisi personal aktivis itu sendiri.

Kata kunci: "persoalan perempuan", aksi politik perempuan, produksi pengetahuan feminis

Pendahuluan

Gerakan feminis di Indonesia memiliki kualifikasi transformatif yang penting bagi perubahan baik pada tingkat kesadaran personal maupun tingkat masyarakat dan negara. Sebagaimana perempuan Asia pada umumnya, perempuan Indonesia melakukan semua hal sejak dari dalam keluarga, organisasi aktivis, tempat kerja, komunitas, dan negara. Padahal di semua level ini, penuh barikade dan belenggu berduri yang wujudnya dapat dikenali sebagai praktik diskriminasi, kekerasan seksual, eksploitasi nilai tenaga kerja, perdagangan perempuan, dan lain sebagainya. Semua

itu dapat berlangsung di dalam unit keluarga, organisasi masyarakat, organisasi ekonomi, dan juga organisasi negara.

Meskipun para perempuan menghadapi barikade pada semua level aktivitas dirinya, tetapi tidak semua perempuan mengetahui bahwa dirinya menghadapi persoalan sebagai perempuan. Kebanyakan perempuan menganggap persoalan-persoalan itu memang bersifat alamiah yang diterima sebagai "nasib" perempuan. Sumbangan feminisme gelombang pertama abad ke-19 adalah memformulasi "persoalan perempuan" (*women's*

question) sebagai pengetahuan sehingga dapat ditransformasikan melalui berbagai medianya. Vogel menyatakan bahwa formulasi “persoalan perempuan” adalah mengonseptualkan isu-isu penindasan perempuan di dalam konteks relasi kuasa sosial dan ekonomi-politik. Ketika pengetahuan itu terformulasi maka mengandaikan adanya formulasi pengetahuan tentang “pembebasan perempuan” (Vogel 1983, hlm. 105).

Feminisme gelombang kedua membangun epistemologi dan metodologi feminis berdasarkan “persoalan perempuan.” Gerakan ini masuk ke ranah filsafat ilmu dan menentukan kategori seks dan gender sebagai metode analisis dalam mengungkap “persoalan perempuan” (Code 1991, hlm. 1). Meskipun “pengetahuan feminisme” bermula dari sejarah Eropa Barat dan AS, tetapi mengalami praxis yang berbeda menurut waktu dan ruang, termasuk ketika bertransformasi ke dalam pengetahuan perempuan Indonesia. Praxis menurut pengertian Lefebvre adalah pengungkapan kompleksitas di dalam berbagai level yang mencakup produksi material sampai dengan yang abstrak dan formal atas simbol, budaya, representasi dan ideologi (Lefebvre 2002, hlm. 236-237). Praxis gerakan feminis itu sendiri mengungkapkan dinamika tegangan, kesenjangan, dan penyatuan aksi politik dan produksi pengetahuan “persoalan perempuan” dan emansipasinya.

Tulisan ini bermaksud untuk melakukan *self-reflective* atas praxis gerakan feminis di Indonesia meski dalam pembahasannya tidak dapat melepaskan dari konteks feminisme dunia. *Self-reflective* merupakan metode yang dipergunakan feminis di dalam filsafat sejarah untuk membaca teks sejarah filsafat yang androsentris, yaitu membaca teks secara kritis menurut perspektif personal yang feminis dengan teks masa lalu (Lloyd 2002, hlm. 1-2). Selain itu, metode *self-reflective* dapat dipergunakan untuk “membaca” pengalaman gerakan feminis dari sisi personal aktivisnya sebagai olah dialog dengan sejarah kolektifnya.

Mengudar Feminisme Lintas Waktu

Etimologi feminis dari Bahasa Latin, *femininus*, dari *femina*, yang artinya “perempuan.” Dalam Bahasa Prancis lama bermakna “kualitas feminin”, yaitu sifat yang dibawa oleh seksualitas yang melekat pada seks perempuan (*female sex*). Menurut *New World Encyclopedia*, orang yang pertama kali menggunakan kata feminisme adalah Charles Fourier, seorang aktivis sosialis dari Prancis, pada 1837 untuk menyebut gagasan atau

politik emansipasi perempuan. Menurut *Oxford English Dictionary*, kata feminisme pertama kali dipergunakan di Inggris pada 1800-an juga untuk menyebut aktivitas emansipasi perempuan. Dalam perkembangannya, kata feminis dipergunakan untuk menyebut aktivis perempuan yang melakukan aktivitas politik menuntut persamaan hak perempuan di dalam Undang-Undang negara terutama hak memilih dan dipilih (*women's suffrage*). Sedangkan kata feminisme dipergunakan untuk menyebut paham emansipasi untuk keadilan sosial, hukum dan politik berdasarkan jenis kelamin. Pada masa ini formulasi “persoalan perempuan” sebagai pengetahuan feminis merupakan isu yang banyak didiskusikan oleh intelektual sosialis (Vogel 1983, hlm. 105). Aksi politik emansipasi perempuan ini disebut feminisme gelombang pertama yang punya karakter kuat dalam aksi massa perempuan kelas pekerja dan perempuan budak kulit hitam.

Gerakan feminis gelombang pertama melahirkan produksi pengetahuan feminis baik yang ditulis oleh perempuan maupun laki-laki, contohnya *A Vindication of the Rights of Women* (1792) oleh Mary Wollstonecraft, *Early Factory Labour in New England* (1883) oleh Harriet H. Robinson, *Ain't I a Woman?* (1851) oleh Sojourner Truth, *The Subjection of Women* (1869) oleh John Stuart Mills dan Harriet Taylor, *The Origin of the Family Private Property and the State* (1884) oleh Friedrich Engels, *Women and Socialism* (1879) oleh August Bebel. Tulisan-tulisan mereka ini menjadi rujukan penting bagi pembangunan teori pengetahuan pada era feminisme gelombang kedua.

Feminisme gelombang kedua di Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, dan AS muncul pada 1960-an – 1970-an dalam pembelaan terhadap perempuan marginal karena perbedaan ras, sebagai imigran dan kelas pekerja yang tidak memiliki hak sipil sebagai warga negara. Mereka mengusung pengetahuan tentang penindasan dan pembebasan sebagai satu kesatuan dalam aksi politik perempuan (Vogel 1995, hlm. 10). Aktivis mahasiswa perempuan ini kemudian menempuh jenjang pendidikan S3 dan merefleksikan pengalamannya sebagai bahan kajian tesis doctoralnya. Pada umumnya aktivis feminis gelombang kedua ini adalah aktivis mahasiswa Kiri Baru (*New Left*) yang menyebarkan pengetahuan di dalam komunitas perempuan imigran kulit “hitam” dan “berwarna” agar mengetahui penindasan yang dialaminya dan menuntut hak sipil sebagai warga negara (Sargent 1981, hlm. 9).

Pada awal dekade 1970-an, para aktivis feminis berupaya menjawab pertanyaan “apakah sumber

penindasan perempuan?”, dan melakukan banyak penelitian, kritik teori sosial yang mereka pergunakan dari Karl Marx, Friedrich Engels (Vogel 1983, hlm. 34), dan Sigmund Freud (Mitchell 1974). Selain kritik teori sosial juga melakukan kritik filsafat dan khususnya filsafat ilmu untuk membangun epistemologi feminis, yaitu membangun pengetahuan feminis agar memiliki kebenaran ilmiah (*truth*).

Produksi pengetahuan feminisme gelombang kedua yang signifikan adalah ‘penemuan’ tentang sistem patriarki sebagai sumber penindasan perempuan dan kategori seks, seksualitas, dan gender untuk menganalisis “persoalan perempuan” (Oakley 1972). Seks merupakan jenis kelamin biologis, seksualitas adalah alat genital yang menandakan ciri jenis kelamin, sedangkan gender adalah pemaknaan seks dan seksualitas dalam pembagian kerja, perilaku, dan identitas secara sosial. Kategori sosial ini kemudian ditambahkan oleh para feminis untuk bersanding dengan kategori lainnya, seperti ras, kelas, etnik, dan lainnya. Dengan menggunakan kategori analisis ini, penelitian feminis dapat membongkar asumsi androsentris (patriarkis) yang mendominasi teori dan praktik sosial (Walby 1990, hlm. 19).

Feminisme gelombang ketiga mendapat pengaruh pascamodern dan pascastrukturalis tumbuh pada dekade 1980-an hingga 1990-an. Aktivis feminis pada era tersebut tidak puas dengan teori pengetahuan yang telah dibangun oleh feminis gelombang kedua, terutama dalam mempersoalkan kategori seks, seksualitas, dan gender. Judith Butler salah satu perintis feminis-pascamodern mempertanyakan kategori seksualitas yang dipaksakan perempuan (vagina) dan laki-laki (penis) sebagai sesuatu yang pasti (*fixed*) dan universal. Sifat pasti dan universal atas kategori seks, seksualitas, dan gender merupakan konstruksi sosial. Sebaliknya, seks, seksualitas, dan gender tidak pasti (*unstable*) dan berbeda-beda menurut budaya (Butler 1999). Jadi, laki-laki dan perempuan merupakan identitas yang “tidak tetap” dan terbukti adanya interseks (LGBT). Gelombang ketiga ini memperkaya penjelasan tentang LGBT dalam payung teori *queer* (Butler, 2004).

Setelah krisis keuangan global pada 2008 yang berdampak berat bagi keluarga di AS dan Eropa, sebagian feminis kembali ke pemikiran feminis gelombang kedua tentang penindasan perempuan dalam kaitannya dengan kapitalisme (Bhattacharya 2017, hlm. 3-4). Beberapa dari feminis ini memadukan Marxisme dan pascamodernisme dan genre feminis ini sering kali disebut “feminis gelombang ke-4” atau

feminis materialisme. Rosemary Hennessy sebagai perintis menyatakan bahwa feminis materialisme mengembangkan teori budaya yang personal dengan yang struktural. Oleh sebab itu, feminis materialisme mengangkat kembali konsep tentang struktur dan agensi yang dikaitkan dengan bahasa dan budaya. Dengan kata lain, feminis materialisme mengawinkan wacana sebagai analisis sosial yang didasarkan pada kondisi material dari masyarakat pada lokal tertentu. Kondisi material ini diperiksa tidak hanya dalam hal gender tetapi juga dalam kaitannya dengan kehidupan nyata perempuan yang beririsan (*intersectional*) dengan ras, etnik, kelas, bahasa, dan lainnya. Topik marginalisasi perempuan menjadi perhatian yang penting bagi feminis materialisme (Hennessy & Ingraham 1997, hlm. 7-8).

Menguatnya produksi pengetahuan di kalangan feminis kontemporer di negara-negara maju memperkuat gelombang emansipasi pengetahuan daripada membangun gerakan massa perempuan sebagaimana feminis gelombang pertama. Kecenderungan ini mengesankan feminisme di negara maju praxis di menara gading daripada praxis dalam gerakan sosial.

Berbeda dengan kecenderungan feminis di negara maju, aksi politik perempuan di negara-negara Asia yang kebanyakan disebut negara sedang berkembang atau mantan jajahan masih membangun gerakan massa perempuan. Kumari Jayawardena cukup komprehensif dalam mendeskripsikan aksi-aksi politik perempuan di India, Mesir, Turki, Iran, India, China, Korea Selatan, Jepang, Sri Lanka, Indonesia, Filipina, China, dan Afganistan. Aksi politik perempuan ini secara umum mengaitkan persoalan perempuan dengan perjuangan kemerdekaan, melawan rezim diktator militer, dan beberapa di antaranya melawan imperialisme dalam bentuk ekspansi *Transnasional Corporation* (TNC) dan *Multinational Corporation* (MNC). Kendati demikian Jayawardena mengakui bahwa feminisme di Asia dipengaruhi oleh feminisme di Barat baik dalam teori maupun praktik (Jayawardena 1986, hlm. 260).

Aksi politik perempuan di Amerika Latin sebagai negara mantan jajahan hampir serupa dengan aksi politik perempuan di Asia. Di Argentina, Peru, Uruguay, Brazil, Chili, partisipasi politik perempuan tumbuh bersamaan dengan gerakan kemerdekaan, demokrasi, perlawanan terhadap rezim diktator militer. Lalu pada masa kontemporer aksi politik perempuan terpusat untuk memobilisasi gerakan perempuan miskin kota, melawan TNC/MNC, dan juga memperjuangkan komunitas adat (Jaquette 1989, hlm. 205).

Transformasi Feminisme ke Dalam Pengetahuan Perempuan Indonesia

Feminisme masuk ke Indonesia melalui relasi antarwarga Belanda dan Hindia Belanda. Kartini adalah agensi yang mengalami transformasi pengetahuan dari feminis Belanda, yaitu antara lain, Estella Zeehandelaar dan Marie Ovink-Soer. Sebuah novel yang signifikan membentuk karakter agensi Kartini ditulis oleh Cecile Goekoop berjudul *Hilda van Suylenburg* (1897). Kartini mengidentifikasi dirinya dengan tokoh dalam novel tersebut, yaitu Hilda yang menolak hidup menunggu lamaran calon suami. Sebaliknya, Hilda bertekad sekolah hingga universitas untuk mengambil bidang studi hukum. Cita-citanya untuk menjadi pengacara untuk membela para perempuan yang tertindas dalam perkawinan terwujud (Toer 1997, hlm. 143-144). Personifikasi Kartini terhadap tokoh Hilda mencerminkan penolakannya terhadap perkawinan muda dan poligami.

Emansipasi dari “persoalan perempuan” tersebut menggarisbawahi perjuangan untuk pentingnya pendidikan bagi perempuan, kesempatan bagi perempuan untuk mencari nafkah dan bekerja sesuai dengan keahlian mereka, dan penghapusan poligami karena dianggap merendahkan martabat perempuan. Namun, persoalan poligami sungguh tidak mudah diemansipasi oleh Kartini. Bahkan Kartini pun pada akhirnya menerima poligami. Kendati demikian, dampak dari pengetahuan dan perjuangan ini berlanjut pada sejumlah pergerakan nasional sampai Indonesia merdeka dan hingga saat ini.

Pengetahuan feminisme Kartini dalam bentuk surat menyurat dengan para feminis Belanda dan kemudian dibukukan oleh Mr. J.H. Abendanon dengan judul *Door Duisternis Tot Licht* (1912). Buku ini kemudian diterjemahkan Armijn Pane ke dalam Bahasa Melayu dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang* yang diterbitkan Balai Pustaka pada 1923. Beberapa aktivis perempuan, seperti Suyatin Kartowiyono, S.K. Trimurti, Umi Sardjono, Maria Ulfah, Siti Sundari Darmobroto, dan lainnya memperoleh transformasi pengetahuan feminisme dari *Habis Gelap Terbitlah Terang* (Rahayu 2021).

Transformasi pengetahuan feminisme dapat menyebar luas berkat ‘revolusi mesin cetak’ di Hindia Belanda yang melahirkan surat kabar yang dipimpin oleh jurnalis perempuan, seperti *Soenting Melayu* yang dipimpin Rohana Kudus, *Tjahaja Siang* diterbitkan organisasi perempuan PIKAT-Manado pimpinan Ny. Walandaw Maramis, *Wanita Sworo* pimpinan Siti

Soendari Darmobroto, *Poetri Hindia* (1914) terbitan organisasi Poetri Mardika.

Tidak hanya perempuan Melayu yang mengalami transformasi kesadaran feminisme. Auw Tjoei Lan anak seorang “Kapiten Cina” (kepala kelompok dan pelindung dari kriminalitas) dari Majalengka aktif melawan perdagangan perempuan miskin dari Tiongkok ke Batavia. Tjoei Lan belajar bahasa Belanda dan sastra di Batavia dengan Dr. Zigman pendiri organisasi *Ati Soetjje*. Selanjutnya Tjoei Lan aktif sebagai pengurus di *Ati Soetjje* untuk melindungi korban perdagangan perempuan yang umumnya dijual sebagai budak rumah tangga atau budak seks dalam industri pelacuran di Batavia (Koran Sulindo 2019).

Pada masa Indonesia merdeka, gerakan perempuan cukup beragam dalam memperjuangkan “persoalan perempuan”. Selain isu yang telah disebutkan, mereka juga memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam parlemen, pembelaan terhadap buruh perempuan, petani perempuan, dan juga solidaritas internasional terhadap negara-negara terkoloni. Transformasi pengetahuan feminis semakin berkembang dalam jejaring internasional dengan menjadi anggota organisasi internasional, yaitu *Women International Federation Democratic* (WIDF) dan *International Council of Women* (Rahayu 2020).

Sepanjang dekade 1950-an dan 1960-an aksi politik perempuan lebih menguat dibandingkan produksi pengetahuan feminisme. Namun secara khusus produksi pengetahuan berupa tulisan di surat kabar mengenai batas minimum usia perempuan layak menikah dan perkawinan monogami cukup signifikan. Umi Sardjono, Ketua Umum Gerwani, bahkan mengusulkan usia 21 tahun sebagai batas minimum perempuan layak menikah sebagai usulan untuk RUU Perkawinan (Sin Po, 26 Januari 1953).

Transformasi pengetahuan feminis sempat terputus pada masa Orde Baru tetapi Konferensi Perempuan Internasional sedunia pada 1975 di Meksiko membuka kembali arus transformasi ini. Ada tiga momen yang signifikan, *pertama*, Konferensi Perempuan Internasional di Meksiko City yang memberi warna baru bagi tradisi penelitian sosial; *kedua*, terjadi transformasi pengetahuan feminisme di kalangan aktivis perempuan muda baik yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat maupun kelompok diskusi kampus; dan *ketiga*, adanya desakan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan mandat Konferensi Perempuan 1975 demi “peningkatan status dan peranan wanita” dalam pembangunan. Di masa Orde

Baru, kata “peningkatan status dan peranan wanita” dapat diterima pemerintah, termasuk di kalangan peneliti dan akademisi. Sementara kata feminisme hanya dipergunakan dan dikembangkan dalam gerilya aktivis perempuan melawan otoritarianisme Orde Baru.

Kontribusi penting pengetahuan feminisme bagi tradisi penelitian sosial adalah penggunaan data terpilih berdasarkan gender. *Prisma* edisi khusus yang memuat tulisan peneliti perempuan “Wanita dan Cakrawala Baru” (*Prisma*, Oktober 1975) adalah permulaan “persoalan perempuan” masuk ke dalam penelitian sosial. Dalam perkembangannya, metode data terpilih berdasarkan gender dipergunakan oleh penelitian kependudukan untuk menyingkap perilaku perempuan dan keluarga berencana. Pada masa ini, konsep gender lebih dipergunakan sebagai data terpilih untuk melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Model penelitian terapan cenderung memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan negara dalam pembangunan terutama terkait keluarga berencana, kerja perempuan dalam pertanian dan urban perkotaan. Penelitian yang dilakukan Pudjiwati Sajogjo sepanjang 1980–1990 mengenai kerja perempuan dalam pertanian sawah telah membongkar asumsi BPS tentang kerja perempuan. Peneliti perempuan dari LIPI seperti Yulfitra Rahardjo, Melly G. Tan, Mayling Oey Gardiner, Saparinah Sadli (UI), T.O. Ihromi (UI) boleh dikatakan sebagai perintis kajian perempuan yang berhasil mendobrak asumsi dasar perempuan dalam pembangunan mengenai “kerja”, “partisipasi”, “status”, “peranan” perempuan dalam unit analisis rumah tangga (Rahayu 2019 hlm. 187).

Adapun penelitian yang non-pembangunan umumnya dikerjakan oleh mahasiswa feminis Indonesia sebagai karya magister di universitas-universitas Eropa dan AS. Contohnya, karya magister Julia Suryakusuma di *Institute of Social Studies* (ISS), Belanda, mengenai domestikasi perempuan disebut *Ibuisme-Negara* melalui organisasi korporatis negara, seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK.

Dalam koridor kelompok diskusi perempuan antar-kampus dan lembaga swadaya masyarakat, kata feminisme menjadi konsep perlawanan terhadap ideologi *konco wingking*, yaitu Panca Dharma Wanita yang menjadi rujukan organisasi perempuan korporatis negara. Kata *koncowingkingisme* (Jawa: teman yang berada di belakang) merujuk pada konsepsi Jawa terhadap posisi dan peran perempuan “di belakang” posisi laki-laki atau dalam konsep ruang rumah berada “di

dapur.” Ideologi *koncowingking* ini merupakan imajinasi militerisme Orde Baru untuk mendomestikasi aksi politik perempuan (Rahayu 2006). Kata *koncowingkingisme* dalam relasi dengan kekuasaan negara di dalam teori feminisme sering disebut dengan istilah ibuisme-negara. Adapun formulasi “Panca Dharma Wanita” memosisikan perempuan sebagai (1) istri pendamping suami, (2) ibu rumah tangga, (3) penerus keturunan dan pendidik anak, (4) pencari nafkah tambahan, (5) dan warga negara serta anggota masyarakat.

Sebelum kata gender dikenal di kalangan aktivis terutama yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah memopulerkan kata “peranan perempuan” yang dikaitkan dengan pembangunan. Konsep “peranan perempuan dalam pembangunan” adalah kata baru yang menjadi program pemerintah atas dukungan lembaga keuangan atau pun donor internasional. Proyek pemerintah untuk mengimplementasikan konsep “perempuan dalam pembangunan” ditunjukkan dengan pembentukan Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita (1978) yang kemudian berubah menjadi Kementerian Urusan Peranan Wanita (Kementerian UPW). Sesuai dengan mandat GBHN REPELITA V 1988, di bawah instruksi Kementerian UPW mengharuskan setiap universitas membentuk Pusat Studi Wanita (PSW) sebagai dukungan ilmiah berupa analisis gender mengenai berbagai aspek dan dimensi permasalahan pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk pengembangan dan integrasi perempuan dalam pembangunan bangsa (Pudjiwati 1991).

Pada saat yang sama, kata gender dipergunakan oleh aktivis perempuan di dalam LSM Perempuan dan PSW sebagai alat analisis ketimpangan sosial terutama pada awal dekade 1990-an. Pada pertengahan dekade 1980-an merupakan masa kelahiran LSM yang secara khusus memperjuangkan kepentingan perempuan atau penegakan hak perempuan. Kalyanamitra salah satu LSM perempuan yang berdomisili di Jakarta mempunyai program yang belum pernah ada sebelumnya yaitu pelatihan gender. Pelatihan gender ini diperuntukkan bagi LSM baik yang memiliki program pemberdayaan masyarakat maupun pemberdayaan perempuan. Materi pelatihan gender ini mencakup pengenalan tentang konsep seks dan gender, perbedaan dan diskriminasi gender di dalam diri, keluarga dan masyarakat, serta mempersoalkan pembangunan yang diskriminatif terhadap gender perempuan. Pada tingkat lanjut, Kalyanamitra memberikan pelatihan tentang penggunaan alat analisis gender untuk program pemberdayaan perempuan

Kiranya pelatihan gender yang diadakan pada mulanya oleh Kalyanamitra dan LSM perempuan lainnya merupakan ajang transformasi pengetahuan feminisme gelombang kedua. Meskipun transformasi ini dalam masih kerangka pembangunan dan melepaskan konsep gender dari feminisme untuk alasan praktis. Namun, penanggalan konsep gender dari induknya itu telah mereduksi feminisme sebagai aksi politik dan teori pengetahuan ke dalam konsep gender untuk tujuan program pemberdayaan perempuan. Sementara itu pada dekade 1990-an masih sedikit aktivis perempuan di Indonesia yang membaca karya-karya feminis gelombang kedua di luar konteks pembangunan. Feminis yang berkuliah magister di Eropa atau AS mempunyai kesempatan membaca literatur feminis gelombang kedua. Begitu juga perempuan Indonesia yang kuliah magister di negara maju tersebut kemudian mendapat pengetahuan feminisme dan menularkan pengetahuan itu ke Indonesia melalui LSM atau aktivitas konsultan program pembangunan. Dengan kata lain literatur feminisme merupakan sesuatu hal yang hanya diakses kelompok elite pada dekade 1990--2000 dan sebagian kecil aktivis perempuan.

Penting untuk dicatat keberhasilan aktivis feminis mendirikan Program Studi Kajian Gender di Universitas Indonesia yang pada awalnya disebut Pusat Kajian Wanita pada 1990 untuk magister. Pembentukan ini merupakan capaian ilmuwan feminis dalam menerobos androsentrisme di dalam kampus yang dipimpin oleh Saparinah Sadli dan T.O. Ihromi. Di dalam program studi gender ini, pengetahuan feminisme dapat ditransformasikan kepada mahasiswa yang sebagian telah bekerja di dalam birokrasi negara. Selain itu, mata kuliah "gender" telah diajarkan terutama di Antropologi, Ilmu Politik, Sosiologi, dan Linguistik, tetapi lebih tergantung pada keberpihakan dosen terhadap feminisme. Namun, keberhasilan ini tidak berkembang meluas di semua universitas dan sampai saat ini studi gender yang paling maju dalam memproduksi pengetahuan adalah tentang politik afirmasi keterwakilan perempuan.

Keberadaan dosen feminis memengaruhi perkembangan pengetahuan feminisme di Indonesia. Sejumlah LSM perempuan dan jurnal feminis di Indonesia digagas oleh para akademisi feminis. Pendeknya, mahasiswa dan dosen perempuan merupakan agensi pengenalan konsep gender yang cukup signifikan dalam penelitian, program pemberdayaan perempuan di masyarakat dan konsultan untuk kebijakan pembangunan. Khususnya *Jurnal Perempuan*

merupakan yang pertama sebagai jurnal yang menjadi wadah bagi tulisan yang menggunakan feminisme sebagai teori pengetahuan. Melalui *Jurnal Perempuan*, pembaca diperkenalkan dengan teori feminis non-pembangunan melalui review buku yang hal ini cukup signifikan dalam mengenal pengetahuan feminisme.

Pada saat reformasi dan sesudahnya, ada dua isu feminisme yang menonjol, pertama kuota 30% keterwakilan perempuan dalam institusi politik formal yang tertulis dalam UU Pemilu. Masuknya isu perempuan ke ranah negara dianggap sebagai capaian aksi politik perempuan di awal reformasi yang signifikan diterima oleh publik. Isu kedua adalah perjuangan penegakan HAM perempuan, secara khusus terkait dengan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual. Kedua isu yang diusung aktivis perempuan/feminis ini "menegara" atau kemudian masuk ke dalam kebijakan negara. Salah satu dampaknya adalah perubahan nomenklatur Kementerian UPW menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dimasukkannya isu kekerasan seksual sebagai salah satu programnya. Manifestasi lain dari pengetahuan feminis di Indonesia adalah lahir Komnas Perempuan sebagai karya gerakan perempuan yang diakui negara.

Saat ini feminisme telah diakui sebagai identitas gerakan perempuan maupun personal. Cukup banyak perempuan yang berani menyatakan dirinya feminis dan pada umumnya mereka terhubung dengan aktivitas LSM, kursus feminisme, dan *fanpage* feminisme. Berbagai penelitian lintas disiplin ilmu telah banyak dilakukan guna mendorong berbagai transformasi sosial. Dalam konteks keadilan iklim misalnya berbagai pendekatan feminisme kerap menjadi basis gerakan dan penelitian untuk isu lingkungan. Di tengah capaian dan perkembangan pengetahuan feminisme di Indonesia, saat ini muncul juga berbagai gerakan kontra-feminisme di masyarakat. Organisasi perempuan maupun partai politik yang konservatif atas nama agama tertentu kerap berupaya mendomestikasi perempuan dan/atau menyingkirkannya dari ruang publik. Beberapa bentuk kontra-feminisme yang gencar dikampanyekan adalah ajakan poligami yang dengan dalil ketahanan keluarga.

Setelah penelusuran transformasi pengetahuan feminisme dalam sejarah dari agensi ke agensi, dari institusi ke institusi, tulisan ini kemudian hendak menjawab pertanyaan tentang apakah pengetahuan feminisme dan bagaimana pengetahuan itu diteorikan dan ditransformasikan?

Pengetahuan Feminisme: Mengoreksi Tradisi “Siapa yang Mengetahui?”

Formulasi teori pengetahuan feminis merupakan suatu perjalanan epistemologis yang masih “muda” dibandingkan epistemologi yang ada. Para feminis merasa perlu untuk membangun teori pengetahuan (epistemologi) feminis sebab dihadapkan pada persoalan tentang “siapa yang mengetahui” (*knower*) dan selanjutnya memiliki otoritas sebagai pemilik pengetahuan.

Dale Spender (1985) mengungkapkan bahwa titik awal pertanyaan tentang “siapa yang mengetahui” dilontarkan oleh Betty Friedan dalam *The Feminine Mystique* (1963). Pada dekade 1950-an laki-laki merupakan sumber pengetahuan publik mengenai perempuan. Menurut pengamatan Friedan sebagaimana dikutip Spender bahwa laki-laki yang mengulas, menganalisis, dan mengarahkan yang seharusnya bagi perempuan agar bahagia, yaitu menjadi istri dan ibu rumah tangga baik secara akademis maupun di dalam media massa. Definisi perempuan bahagia tidak dibangun berdasarkan pengalaman dan refleksi perempuan melainkan dari perspektif laki-laki. Friedan meyakini bahwa tulisan laki-laki mengenai perempuan itu memengaruhi kehidupan perempuan sebagai istri, ibu, pengurus rumah tangga, dan bahkan tentang pemaknaan atas kebahagiaan. Friedan lalu ingin tahu sudut pandang yang berasal dari perempuan itu sendiri dan kemudian menjumpai para perempuan di daerah suburban AS untuk mengetahui pengalaman hidup mereka. Ternyata banyak perempuan tidak bahagia ketika diharuskan menjadi istri dan ibu yang mengurus rumah tangga. Mereka bosan dan jenuh, serta ingin bekerja dan memperoleh aktualitas atas kapabilitas yang mereka miliki. Maka kampanye bahwa perempuan lebih berbahagia di dalam rumah dan mengurus rumah tangga merupakan asumsi laki-laki daripada fakta (Spender 1985, hlm. 7--8).

Cara Friedan mengungkap pengalaman perempuan itu menurut Spender belum dalam kerangka membangun teori pengetahuan feminis. Namun, cara Friedan menggali pengetahuan berdasarkan pengalaman perempuan menginspirasi tentang “siapa yang mengetahui” (*who knows*) dalam metodologi penelitian feminis dekade 1970-an (Spender, 1985, hlm. 9).

Menurut Spender, Ann Oakley lah feminis yang mengawali metodologi penelitian feminis di dalam penelitian untuk mengeksplorasi eksistensi perempuan yang tidak nampak (*invisible*) di dalam ilmu sosiologi.

Oakley mewawancarai 96 perempuan mengenai kehidupan mereka dalam rumah tangga. Padahal di masa itu, pengalaman hidup di dalam rumah tangga tidak dikenal di dalam penelitian sosiologi yang hanya berfokus pada relasi sosial yang bersifat struktural. Oakley kemudian menemukan sosok Hannah Gavron yang pengalamannya menggambarkan jaring laba-laba dengan relasi yang struktural. Sosok Gavron ini menginspirasi Oakley untuk melihat pengalaman perempuan lainnya dan menjadikan Gavron sebagai model pembangunan pengetahuan (*model knowledge-making*). Tidak hanya itu. Oakley mengumpulkan data semua jenis kelamin lintas budaya dan menemukan bahwa sifat menjadi perempuan dan laki-laki terbukti sebagai hasil dari karakterisasi masyarakat daripada sifat alamiah (Spender 1985; Oakley 1995).

Spender percaya bahwa “siapa yang mengetahui” dalam teori pengetahuan merupakan perihai yang signifikan. “Siapa” berdasarkan seks dan gender menentukan pembentukan pengetahuan. Nyatanya pengetahuan yang berasal dari perempuan berbeda dengan pengetahuan yang berasal dari laki-laki. Sementara itu, bangunan teori pengetahuan yang ada bersifat androsentris karena berasal dari pengetahuan laki-laki dan membuat pengetahuan perempuan tersembunyi (*invisible*) dan tidak terobservasi (*unobservable*). Atas dasar itulah, feminis kemudian membangun teori pengetahuan (epistemologi) feminis.

Sebelumnya, Simone de Beauvoir telah melakukan refleksi filosofis mengenai eksistensi perempuan sebagai “yang lain.” Pengertian perempuan sebagai “yang lain” adalah perempuan bukan representasi dunia. Representasi dunia adalah laki-laki, bahkan, dunia itu sendiri dibentuk oleh laki-laki (Beauvoir 1953, hlm. 95--96). Konsekuensi atas hal ini bahwa “siapa yang mengetahui” dan pengakuan kebenaran atas pengetahuan ada pada otoritas laki-laki. Implikasi praktis “siapa yang mengetahui” adalah laki-laki lantas menciptakan nilai, norma, dan makna politik atas penataan masyarakat dan negara berdasarkan pandangan laki-laki. Hal ini menempatkan *common good* (kebaikan bersama) sebagai tujuan politik warga masyarakat atau negara hanya menyangkut perspektif dan kepentingan laki-laki. Jadi, di ranah pengetahuan dan politik yang androsentris ini perempuan dipandang tidak mengada sebagai subjek dunia, subjek pengetahuan, dan subjek politik (Code 1991)

Lalu apakah yang dimaksud dengan pengetahuan? Lorraine Code dalam karyanya *What Can She Know: Feminist Theory and The Construction of Knowledge*

(1991) berupaya membangun teori pengetahuan feminis dengan memusatkan perhatian pada “siapa yang mengetahui.” Sebab para feminis menghadapi persoalan “siapa yang mengetahui” sebagai sesuatu yang abstrak, tanpa ciri, yang diformulasikan dalam proposisi “*S knows that p*”, yaitu *S* adalah siapa yang mengetahui objek *p*. Ketika dunia direpresentasikan sebagai laki-laki (Beauvoir 1953), *S* diasumsikan sebagai laki-laki dan di dalam analisis epistemologis komunitas laki-laki sehingga mereka melakukan klaim kebenaran atas pengetahuan yang diperolehnya. Para feminis di ranah pengetahuan menghadapi persoalan tentang klaim atas kebenaran (*truth*) selain mengenai “siapa yang mengetahui” (Code 1991, hlm. 1).

Tradisi ilmiah sebagaimana dikemukakan Code berangkat dari teori pengetahuan rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes (1596-1650). Sebagaimana dikutip Code, Descartes menyatakan bahwa pengetahuan merupakan produksi rasio. Teori pengetahuan Descartes disebut rasionalisme. Descartes mengunggulkan rasio sebagai pusat pengetahuan, pada saat yang sama tubuh manusia (non-rasio) dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikenal dalam proses mengetahui-menciptakan pengetahuan. Bangunan teori pengetahuan Descartes ini disebut juga dualisme Cartesian sebab Descartes melakukan *clear and distinct* terhadap aspek rasio dan non-rasio (tubuh). Menurut Code, implikasi rasionalisme Descartes adalah bahwa perempuan yang diasosiasikan dengan tubuh dianggap sebagai makhluk non-rasio. Implikasinya baik pengalaman, refleksi, juga pengetahuan perempuan dianggap sebagai non-pengetahuan. Subjek pengetahuan dalam definisi Descartes adalah orang yang memiliki kapasitas kognitif yang menguasai matematika, astronomi, fisika, dan filsafat (Code 1991 hlm. 5-6).

Code menuturkan bahwa tradisi rasionalisme adalah mencari kebenaran berdasarkan koherensi pengetahuan dan realitas dalam sebuah proposisi “*S knows that p*” atau dapat dirumuskan dalam contoh “Sandra tahu (*S*) bahwa pintu terbuka (*p*).” Proses ilmiah merupakan pengujian atas pengetahuan yang sudah ada (tesis pengetahuan terdahulu) ke dalam eksperimen atas objek-objek yang diamati. Penemuan (*discovery*) atas objek teramati harus memperoleh pembenaran (*justification*) dari komunitas ilmiah yang menurut Code didominasi oleh ilmuwan atau pemilik pengetahuan laki-laki (Code 1991, hlm. 8).

Metode yang dipergunakan dalam tradisi rasionalisme deduktif yang bersifat menyederhanakan kompleksitas “siapa yang mengetahui” (*S*) dan juga

objek pengetahuan (*p*). Proposisi rasionalisme berdasarkan rumus *A* dan non-*A* sehingga menutup berbagai kemungkinan selain *A* dan non-*A*. Segala sesuatu harus menjadi salah satu (yang dominan) atau menjadi yang lain (yang subordinat). Antara unsur *A* dan non-*A* tidak ada hubungan kontinuitas. Logika murni ini menjadi persoalan ketika dihadapkan pada sisi manusia yang berhubungan dengan perasaan, emosi, cinta, dan menganggap sisi ini sebagai “yang lain” yang bukan dalam kontinuitas dengan rasio. Oleh sebab itu, pengalaman perempuan yang berhubungan dengan kapasitas mencintai dan merawat anggota keluarganya dipandang sebagai non-pengetahuan karena bersifat subjektif (Code 1991, hlm.13).

Dalam telaah Code, feminis juga menghadapi persoalan dalam pendakuan kebenaran yang berkaitan dengan objektivitas. Objektivitas menurut kaidah ilmu adalah (1) mengajukan bukti yang dapat diakses oleh publik dan bukan berupa pengalaman subjektif seperti pengalaman hidup seorang perempuan. “Siapa yang mengetahui” atau ilmuwan, seperti Copernicus, Newton, dan Einstein ketika mengajukan bukti temuannya dapat diakses oleh ilmuwan lainnya sama persis dengan temuannya. Dalam hal ini, objektivitas berarti bahwa (2) bukti tersebut bersifat tetap (*invariant*) dan universal sampai kapan pun orang mengaksesnya. Sebagai contoh, teori gravitasi bumi yang ditemukan Newton bersifat tetap dari sejak penemuan itu hingga saat ini. Untuk itu objektivitas adalah (3) bukti berupa fakta dan bukan berupa nilai, atau disebut juga bebas nilai (Code 1991, hlm. 11).

Menurut Code, perempuan tersembunyi di dalam teori pengetahuan sebab “siapa yang mengetahui” tidak netral jenis kelamin dan kriteria objektivitas tidak mengakui subjektivitas. Sementara itu, usaha dari para feminis untuk mengungkap pengetahuan perempuan melalui pengalaman hidupnya adalah sesuatu yang subjektif. Sifat subjektif pengetahuan perempuan tidak dapat diakses oleh publik lintas ruang dan waktu, tidak memiliki kepastian (*invariant*), berbeda menurut “perempuan yang mengetahui” dan karena itu tidak universal. Atas dasar ini, Code menawarkan subversi “siapa yang mengetahui” berdasarkan *clear and distinct* jenis kelamin (Code 1991, hlm. 8).

Code menolak dikotomi objektif/subjektif yang berimplikasi bahwa pengetahuan ‘murni objektif’ saja yang layak mendapat pengakuan epistemologis. *Pertama*, Code menolak premis yang meyakini bahwa beberapa pengetahuan dapat dikatakan sepenuhnya objektif dan beberapa sepenuhnya subjektif. Menurut

Code, pengetahuan merupakan produk dari pembauran unsur yang objektif dan subjektif. *Kedua*, dalam kaitannya dengan kebenaran, Dualisme Cartesian berpendapat bahwa semua objektif atau semua subjektif. Implikasi dari premis ini menurut Code bahwa intrusi subjektivitas ke dalam objektivitas dipandang merusak tesis (yang sudah mendapat pendakuan kebenaran dari komunitas ilmiah) *qua* pengetahuan (yang belum mendapat pendakuan kebenaran dari komunitas ilmiah). Sebaliknya, dalam pandangan Cartesian, jika pengetahuan dapat dinyatakan semua subjektif hal itu dikhawatirkan terjatuh pada relativisme ekstrim, bahkan solipsisme yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pengalaman pribadi merupakan fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Posisi Code menolak anggapan ini dan menawarkan intrusi subjektivitas ke dalam objektivitas sebagai upaya *reclaiming the feminine* di dalam tradisi rasionalisme (Code 1991, hlm.12).

Selain itu, Code juga memeriksa anggapan bahwa perempuan kurang dalam memiliki kapasitas rasio. Code mengutip penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kognitif yang alami antara perempuan dan laki-laki. Temuan seperti ini pada akhirnya menurut Code tergantung pada orientasi politik “siapa yang mengetahui”, yaitu akan ditafsirkan sebagai penegasan supremasi laki-laki dan inferioritas perempuan atau sebagai indikasi kebutuhan untuk menilai kembali keperempuanan. Code mengutip pendapat Ruth Bleier mengenai studi lateralisasi otak manusia bahwa biologi otak itu dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman individu. Pendapat ini dibuktikan oleh Janet Sayers bahwa ternyata tidak ada perbedaan dalam penelitian tentang otak berdasarkan jenis kelamin. Salah satu contoh adanya keyakinan bahwa otak laki-laki menguasai kemampuan spasial (kemampuan matematika) sedangkan otak perempuan menguasai kemampuan verbal (bahasa). Bukti penelitian ini mengukuhkan pendapat Bleier agar hati-hati dalam penyimpulan studi laterisasi otak. Perbedaan dalam fungsi otak perempuan dan laki-laki sama masuk akal nya dengan faktor-faktor sosial budaya yang membentuk stereotip berdasarkan jenis kelamin yang dilakukan oleh orang tua sejak masa anak-anak (Code 1991, hlm. 16-17).

Code sampai pada formulasi untuk menteorikan pengetahuan feminisme. *Pertama*, Code tidak menanggalkan objektivitas tetapi juga tidak mengagungkan objektivitas murni. Ia menanggalkan dualisme objektif dan subjektif sehingga memungkinkan pengalaman agen kognitif yang berbeda seks atau

jenis kelamin sebagai sumber pengetahuan. *Kedua*, Code menggunakan kategori perbedaan seks untuk memperjelas tentang “siapa yang mengetahui” sehingga memungkinkan perempuan sebagai pemilik pengetahuan. Dengan kata lain, Code berupaya untuk mengukuhkan bahwa pengalaman perempuan dengan segala emosinya memiliki status epistemik.

Sampai saat ini, perdebatan di dalam filsafat ilmu bahkan di antara filsuf feminis itu sendiri masih penuh dinamika. Namun demikian, pengukuhan atas “siapa yang mengetahui” berdasarkan penggunaan kategori seks dan gender untuk menganalisis ketimpangan sosial telah menciptakan “revolusi pengetahuan” yang signifikan. “Revolusi pengetahuan” itu telah mengubah asumsi di dalam ilmu sosial, kebijakan pembangunan, gerakan sosial, dan individu-individu.

“Persoalan Perempuan” dalam Tegangan Produksi Pengetahuan dan Aksi Politik

Refleksi atas perjalanan feminisme dalam pengetahuan tentang “persoalan perempuan” dan aksi politik emansipasi menunjukkan adanya dinamika. Dalam praxis di Indonesia, dinamika untuk mengungkap “persoalan perempuan” sering dalam tegangan antara isu dan juga antara aksi politik dan produksi pengetahuan untuk mendukung aksi tersebut.

Produksi pengetahuan adalah kategori luas yang mencakup berbagai bentuk produk yang dihasilkan oleh proses penelitian dan pembuatan model yang dapat diaplikasikan ke dalam tindakan praktis maupun kebijakan. Produksi pengetahuan versi feminisme mencakup keseluruhan refleksi atas aksi, penelitian atas pengalaman aksi baik personal maupun kelompok, yang kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai model untuk aksi politik perempuan itu sendiri dan kebijakan.

Jika dirunut “persoalan perempuan” sejak Kartini sampai saat ini, terlihat ada isu yang berkelanjutan tetapi saat ini tidak menciptakan aksi politik luas dan produksi pengetahuan yang signifikan. Contohnya pada isu mengenai perkawinan muda dan poligami. Persoalan ini seperti penyakit endemik, wabah yang sudah berusaha diberantas oleh aktivis perempuan di masa lalu tetapi tidak pernah bisa lenyap dan bahkan menciptakan perbedaan pendapat di kalangan aktivis itu sendiri. Sementara itu, produksi pengetahuan kontra-feminis lebih kuat dengan menggunakan dalih kemiskinan dan agama tertentu untuk membenarkan praktik poligami dan perkawinan muda. Kontras dari isu poligami dan perkawinan muda adalah isu keterwakilan

perempuan dan kekerasan seksual saat ini berhasil menciptakan aksi politik dan produksi pengetahuan yang meluas. Menguatnya kedua isu ini menciptakan tegangan dan kesenjangan dengan isu poligami dan buruh perempuan yang aksi politiknya kecil dan produksi pengetahuannya lemah.

Pada awal reformasi, aksi politik untuk mengungkap kekerasan berbasis gender dalam konteks struktural yang melibatkan kebijakan penguasa negara menguat. Produksi pengetahuan pun menguat untuk memformulasi kekerasan berbasis gender dalam pelanggaran berat HAM (*gross violation of human rights*) di masa lalu. Komnas Perempuan sangat berperan dalam merawat aksi politik dan produksi pengetahuan mengenai kekerasan berbasis gender. Model sistem kerja pemulihan korban dan pembangunan *crisis centre* oleh LSM Perempuan cukup berkembang pada awal reformasi tetapi menurut terutama setelah isu keterwakilan perempuan menguat.

Dalam perkembangannya, banyak *crisis centre* yang dibangun oleh aktivis feminis tutup. Meski pemerintah kini telah membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Pelembagaan ini sebenarnya telah dirintis sejak Khofifah Indar Parawansa menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan pada awal reformasi. Selain itu, pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi undang-undang pada 22 April 2022 merupakan keberhasilan aksi politik perempuan yang mencakup LSM Perempuan, Komnas Perempuan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Aksi politik untuk mewujudkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen menguat pada awal reformasi. Kekuatan ini disertai oleh pekerjaan lembaga-lembaga penelitian dalam memproduksi pengetahuan. Pada mulanya, Centre for Electoral Reform (CETRO) berdiri sebagai lembaga pemantau pemilu dan secara khusus turut mengembangkan strategi politik afirmasi keterwakilan perempuan. Ani Soetjipto salah seorang peneliti feminis yang aktif di CETRO cukup produktif dalam menyebarkan produksi pengetahuan ke pemilu dari perspektif feminis dan tawaran praktisnya di surat kabar. Setelah itu, berdiri lembaga penelitian yang berbasis kampus seperti Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI. Di luar kampus, seperti Cakra Wikara Indonesia (CWI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) membuat penelitian dan model-model strategi bagi kandidat untuk dapat

memenangkan pemilu legislatif dan Pilkada. Hasil-hasil penelitian ini juga mereka ajukan untuk merevisi UU Pemilu yang masih menghambat perempuan dalam memenangkan kompetisi dalam pemilu dan pilkada.

Kiranya kandidat perempuan tidak hanya terhambat oleh prosedur administratif ke pemilu, tetapi yang fundamental justru hambatan yang berasal dari partai politik. CWI telah mengeluarkan laporan penelitian *Meretas Jarak Afirmasi dan Administrasi: Studi Tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi Pada Struktur DPP Partai Politik* (2021) menemukan persoalan (1) pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam struktur formal DPP partai politik masih diperuntukkan sebagai syarat administratif belaka agar dapat mengikuti pemilu; (2) setelah pemilu usai, persentase perempuan di DPP cenderung menurun dan akan naik mencapai kuota 30% menjelang pemilu berikutnya (CWI 2021).

Isu keterwakilan perempuan dalam politik formal sebenarnya sudah menjadi mandat Kongres Perempuan III di Bandung pada 1938. Pada 1939, ada empat aktivis perempuan yang berhasil memenangkan pemilu sebagai anggota Dewan Kotapraja, yaitu Ny. Sudirman untuk Surabaya, Ema Puradiredja untuk Bandung, Siti Sukaptinah untuk Semarang, dan Siti Umiyati untuk Cirebon. Siti Sukaptinah kemudian terpilih sebagai anggota Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1944 (Janti 2019). Mandat keterwakilan perempuan konsisten diperjuangkan pada saat pemilu yang diselenggarakan pertama kali setelah Indonesia merdeka pada 1955 untuk pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat (Arsip Nasional 2015). Mandat ini kembali dideklarasikan dalam Kongres Perempuan setelah reformasi 1998 pada 22 Desember 1998 di Yogyakarta dan selanjutnya membentuk Koalisi Perempuan Indonesia sebagai wadah aksi politik keterwakilan perempuan.

Isu keterwakilan perempuan dan kekerasan seksual hingga saat ini cukup maju dalam aksi politik dan produksi pengetahuan. Namun terasa ada tegangan dan kesenjangan dengan isu buruh perempuan atau "perempuan dan kerja." Tegangan itu dalam bentuk curahan politik untuk isu keterwakilan perempuan dan kekerasan seksual mendapat dukungan skala besar lintas gender dan posisi kelas sosialnya tetapi dukungan mengecil untuk isu buruh perempuan.

Namun, penelitian mengenai perempuan dan kerja justru signifikan yang didukung oleh Lembaga-lembaga penelitian perburuhan seperti INKRISPENA (Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif), TURC (Trade Union Research Centre) dan

yang bersifat akademik. Buku *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial* (1997) yang ditulis oleh Ratna Saptari dan Brigitte Holzner juga telah merintis produksi pengetahuan tentang situasi kerja perempuan. Sementara itu, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) yang telah memproduksi tulisan pengalaman buruh perempuan yang mereka tulis sendiri. Namun, aksi politik feminis masih lemah terkendala oleh adanya kesenjangan antara gerakan buruh dan gerakan perempuan. Isu buruh perempuan seperti tidak menggerakkan politik semua perempuan karena basis kelas sosialnya berbeda sehingga kepentingan "politik kelas"nya pun berbeda. Selain itu, isu buruh perempuan sering kali masih dikaitkan dengan stigma "PKI/Gerwani" sehingga dipandang sensitif.

Sebaliknya dari isu buruh perempuan, isu perempuan dan krisis ekologi mendapat sambutan meluas meskipun masih tampak temporer. Produksi pengetahuan tentang perempuan dan krisis ekologi mulai meningkat signifikan. Sementara itu, aksi politik untuk isu LGBT terjadi dalam skala kecil dan produksi pengetahuannya pun masih terbatas.

Penutup

Refleksi ini telah memberikan petunjuk, *pertama*, "persoalan perempuan" bisa mengalami reduksi ke dalam isu-isu yang menonjol, yaitu keterwakilan perempuan dan kekerasan seksual. *Kedua*, konsekuensi menonjolnya isu keterwakilan perempuan dan kekerasan seksual telah membuka peluang gerakan konservatif untuk mengangkat isu ajakan poligami dan perkawinan muda. *Ketiga*, ada kesenjangan antara aksi politik buruh perempuan dan produksi pengetahuannya yang diperkirakan karena isu ini memiliki stigma dan tidak mewakili kepentingan semua perempuan. *Keempat*, diperlukan keseimbangan antara aksi politik dan produksi pengetahuan sehingga setiap isu dari "persoalan perempuan" mempunyai capaian signifikan.

Tulisan reflektif ini ditutup dengan pertanyaan lanjutan mengapa isu keterwakilan perempuan dalam politik dan kekerasan seksual menonjol saat ini? Apakah kemenonjolan itu mencerminkan "persoalan perempuan" dewasa ini? Tentu penjelasan atas pertanyaan ini membutuhkan penelitian lebih lanjut dan bukan sekedar refleksi sebagaimana tulisan ini.

Selain itu, praxis feminisme di Indonesia memberikan pembelajaran bahwa aksi politik dan produksi pengetahuan sebaiknya berjalan seimbang. Hal ini agar

suatu isu "persoalan perempuan" di satu pihak tidak hanya berupa aksi politik dan di lain pihak tidak hanya berupa aktivitas penelitian dan produksi pengetahuan. Sebab jika merujuk pada Lefebvre, praxis mencakup totalitas yang material dan spiritual (dalam arti pengetahuan, ideologi, simbol). Dengan demikian, gerakan feminisme sebaiknya memiliki kemampuan yang mencakup totalitas tersebut agar kapabilitasnya mempunyai daya kuasa yang emansipatif.

Daftar Pustaka

- Beauvoir, S. 1953. *The Second Sex*. penerjemah dan penyunting H.M. Parshley. Jonathan Cape: London.
- Bebel, A. & Lilienthal, M.S. 1910. *Woman and Socialism*.
- Bhattacharya, T. 2017. *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression*. Pluto Press: London.
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022, April 3). Charles Fourier. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Charles-Fourier>.
- Butler, J. 1999. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of identity*. Routledge: London & New York.
- Butler, Judith 2004, *Undoing Gender*, New York & London, Routledge.
- Charles Fourier. 2020. *New World Encyclopedia*, diakses pada 12 Juni 2021, di https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Charles_Fourier#:~:text=of%20social%20needs.-,F%C3%A9minisme,which%20its%20women%20were%20liberated.
- Code, L. 1991. *What Can She Know? Feminist Theory and the Construction of Knowledge*. Cornell University Press: Ithaca & London.
- Engels, F. 1942. *The Origin of the Family, Private Property and the State*. International Publishers: New York.
- Friedan, B. 1963. *The Feminine Mystique*, New York, Norton.
- Goekoop, C. 1989. Hilda van Suylenburg, Scheltema & Holkema, Dutch.
- Guide Arsip Pemilihan Umum 1955--1999, 2015, Jakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Hennessy, R. & Ingraham, C. 1997. *Materialist Feminism: A Reader in Class, Difference, and Women's Lives*. Routledge: London & New York.
- Jayawardena, K. 1986. *Feminism and Nationalism in the Third World*. Kali for Women: New Delhi.
- Lefebvre, H. 1961. *Critique of Everyday Life Volume II*. diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh John Moore. Verso: London & New York.
- Janti, Nur 2019, *Historia*, "Sukaptinah Berjuang Agar Bangsa dan Kaumnya Tak Dijajah", diakses pada Historia.id, 9 Januari 2019, di: <https://historia.id/politik/articles/sukaptinah-berjuang-agar-bangsa-dan-kaumnya-tak-dijajah-vxJ5d>
- Jaquette, J.S. 1989. *The Women's Movement in Latin America*. Unwin Hyman: London & USA.

Koran Sulindo 2019, "Politik Etis dan Bangkitnya 'Kesadaran' Tionghoa", diakses pada 2 Juni 2022, di: <https://koransulindo.com/politik-etis-dan-bangkitnya-kesadaran-tionghoa/>

McKissack, P. 1992. *Sojourner Truth: ain't I a Woman?* Scholastic: New York.

Mill, J.S. 1869. *The Subjection of Women*. Longmans, Green, Reader and Dyer: London.

Mitchell, J. 1971. *Women Estate*. Penguin: London.

Oakley, A. 1972. *Sex, Gender and Society*. Gower/Maurice Temple Smith: England.

Prisma. 1975. *Wanita dan Cakrawala Baru*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial: Jakarta.

Rahayu, R.I. 2019. "Membongkar Asumsi Kerja Perempuan: Kontribusi Pudjiwati Sajogyo". dalam Mohammad Shohibuddin dan Adi D. Bahri. *Perjuangan Keadilan Agraria*. Insist Press: Yogyakarta.

Rahayu, R.I. 2006. "Militerisme Orde Baru dan Ideologi Koncowingking: Pengukuhan Ideologi Perempuan Indonesia Versi Ksatria Jawa". dalam Baskara T. Wardaya (penyunting). *Warisan Otoritarianisme Orde Baru*. ELSAM and PUSDEP: Jakarta.

Rahayu, R.I. 2020. *IndoProgress*, "Feminisme Anti-Imperialis Gerwani di Panggung Perang Dingin", diakses pada: 13 Februari 2020, <https://indoprogress.com/2020/02/feminisme-anti-imperialis-gerwani-di-panggung-perang-dingin/>.

Robinson, H.J.H., Wright, C.D., & Massachusetts. 1889. *Early factory labor in New England: (from the Fourteenth Annual Report of the Massachusetts Bureau of Statistics of Labor for 1883)*. Wright & Potter Print. Co: Boston.

Samosir, H., Mulyani, D.S., & Margret, A. 2021. *Meretas Jarak Afirmasi dan Administrasi: Studi Tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi Pada Struktur DPP Partai Politik*. Cakra Wikara Indonesia: Jakarta.

Saptari, R. & Holzner, B. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.

Sardjoni, U. *Sin Po* "Perkawinan di RRT, *Sin Po*, 26 Januari 1953.

Sajogyo, P. 1991. *Latar Belakang Perlunya Pendirian Pusat Studi Wanita Dalam Lingkungan Perguruan Tinggi*, Pusat Studi Wanita, Institut Pertanian Bogor.

Sargent, Lydia. (ed) 1981. *Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism*. Black Rose Books: Montreal.

Simpson, J.A., Weiner, E.S.C., & Oxford University Press. 1989. *The Oxford English Dictionary*. Clarendon Press Oxford.

Spender, D. 1985. *For the Record: The Making and Meaning of Feminist Knowledge*. The Women's Press: London. Toer, P.A. 1997. *Panggil Aku Kartini Saja*. Hasta Mitra: Jakarta.

Vogel, L. 1983. *Marxisme and the Oppression of Women: Toward Unitary Theory*. Rutgers University Press: USA.

Vogel, L. 1995. *Women's Questions: Essays for a Materialist Feminism*. Routledge: New York. Walby, S. 1990. *Theorizing Patriarchy*. Blackwell: Oxford-UK & Cambridge-USA.

Wollstonecraft, M. 2004. *A vindication of the rights of woman*. Penguin Books: London.

Charles Fourier. (2020, January 9). New World Encyclopedia, diakses pada 12 Juni 2021, di https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Charles_Fourier#:~:text=of%20social%20needs.,F%C3%A9minisme,which%20its%20women%20were%20liberated.

Catatan Akhir

- 1 Walaupun terdapat kontradiksi antara agenda WIDF dan ICW selama masa Perang Dingin, tetapi keduanya memberikan sumbangan yang cukup besar dalam komisi peningkatan status perempuan di PBB hingga terselenggara konferensi-konferensi perempuan sedunia pada 1975 di Meksiko, konferensi kedua di Copenhagen pada 1980, dilanjutkan di Nairobi pada 1985, dan di Beijing pada 1995.